

PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN
KOMISI PEMEBERANTASAN KORUPSI

LHKPN

Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Manfaat pelaporan harta

Lapor LHKPN

Terbangunnya
Budaya Anti Korupsi

Berkurangnya
Korupsi

- Jujur, Terbuka & Tanggung Jawab
- Merasa diawasi
- Rasa takut berbuat korupsi
- Sarana Kontrol Masyarakat

Dasar Hukum LHKPN

- UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

Kewajiban PN/Calon PN

1. Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 28 Tahun 1999

- Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum , selama dan sesudah menjabat.

2. Pasal 5 ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 1999

- Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

3. Pasal 58 huruf i, UU RI Nomor 12 Tahun 2008

- Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - (i). Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.

KEWENANGAN KPK

Pasal 13 Huruf a

Dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan, KPK berwenang melakukan Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN

SIAPA YANG HARUS MENYAMPAIKAN LHKPN?

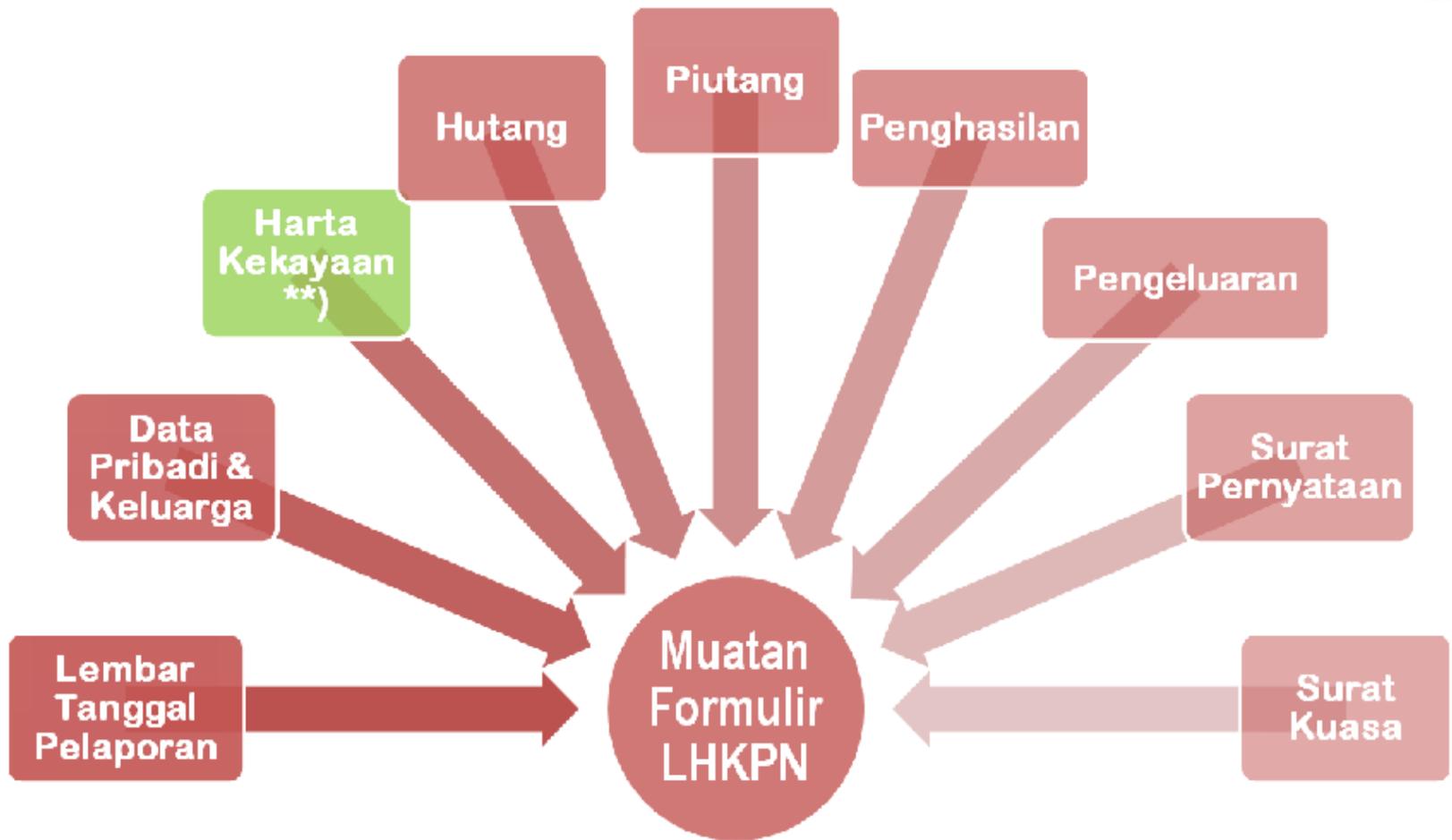
UU No. 28 Tahun 1999

- PN pada Lembaga Tertinggi Negara;
- PN pada Lembaga Tinggi Negara;
- Menteri;
- Gubernur;
- Hakim;
- PN lain sesuai dgn ketentuan (Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota)
- Pejabat strategis (BUMN & BUMD, Pimpinan BI; Pimpinan PTN, Eselon Satu, Jaksa, Penyidik, Panitera, Pimpro/Benpro)

SE Menpan SE/03/M.PAN/01/2005

- Eselon II
- Kepala Kantor di lingkungan Depkeu
- Pemeriksa BC
- Pemeriksa Pajak
- Auditor
- Pejabat yang mengeluarkan perijinan
- Pejabat/Kepala Kantor Pelayanan Masyarakat
- Pejabat pembuat regulasi

Muatan LHKPN



HARTA YANG DILAPORKKAN



Muatan Naskah LHKPN Yang Diumumkan

Harta Tidak Bergerak

Tanah dan Bangunan

Harta Bergerak

Alat Transportasi

Peternakan, perikanan, perkebunan, usaha lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- Logam/Batu Mulia
- Perabotan
- Barang elektronik, dll

Surat Berharga

Saham, Obligasi, Unit Link, Reksadana, dll

Giro & Setara Kas Lainnya

Giro, Tabungan, Deposito, Uang Tunai & setara kas lainnya

Piutang & Hutang



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

2012

B 1

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 6 Maret 2012 No. 19

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

**BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUDI
2. Jabatan : BENDAHARA – DINAS PERTAMAMAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
3. NIK : 4456
4. Tempat & Tanggal Lahir : BANDUNG, 12 Juni 1980
5. Alamat Kantor : JL. RAYA BANDUNG NO. 121
6. Tanggal Pelaporan : 20 Agustus 2009, 31 Desember 2011

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

- | | Status Laporan | |
|---|-----------------|------------------|
| | 20 Agustus 2009 | 31 Desember 2011 |
| 1. Tanah seluas 110 m ² , di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Pembelian Data Karena Jual) | Rp. 77.220.000 | Rp. 228.240.000 |
| 2. Tanah & Bangunan seluas 120 m ² & 120 m ² , di Kota JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI perolehan tahun 2010 (Penambahan Data Baru) | Rp. 77.220.000 | Rp. 228.240.000 |

B. HARTA BERGERAK

**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| 1. Motor, merk SUZUKI THUNDER, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | Rp. 11.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| 2. Motor, merk HONDA BEAT, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 2009 (Penambahan Data Baru) | Rp. 11.000.000 | Rp. 7.000.000 |

**b. PETERNAKAN,
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA**

**c. HARTA BERGERAK
LAINNYA**

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. LOJAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun — (Penambahan Data Baru) | Rp. 60.000.000 | Rp. 65.000.000 |
| 2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 |

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| 3. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru, Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | Rp. 60.000.000 | Rp. 65.000.000 |
|---|----------------|----------------|

C. SURAT BERHARGA

**D. GIRO DAN SETARA KAS
LAINNYA**

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan Data Karena Penambahan/Penjurangan) | Rp. 40.636.460 | Rp. 62.879.438 |
|---|----------------|----------------|

E. PIUTANG

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Piutang baru) | Rp. 40.636.460 | Rp. 20.512.738 |
|---|----------------|----------------|

TOTAL HARTA (II)

III. HUTANG

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN SARANG (Penambahan Hutang baru) | Rp. 189.156.460 | Rp. 360.000.000 |
|---|-----------------|-----------------|

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II
- III)**

- | | | |
|--|-----------------|----------------|
| | Rp. 189.156.460 | Rp. 53.632.274 |
|--|-----------------|----------------|

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLT. DEPUTI

Jakarta, 6 Februari 2012
DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
Pemeriksaan LHKPN
DIREKTUR

APA YANG HARUS DICERMATI?

Kebenaran & Kelengkapan Pelaporan

Kewajaran Kepemilikan Harta

Asal-Usul Harta Kekayaan

Kebenaran & Kelengkapan Pelaporan



L E N G K A P

Seluruh harta yang dimiliki sudah dilaporkan



B E N A R

- Harta yang dilaporkan benar milik PN;
- Informasi seputar harta yang dilaporkan sudah benar

Kewajaran Kepemilikan Harta



- Gaji
- Tunjangan
- Honor
- Penghasilan dari kekayaan
- Penghasilan dari profesi
- dll

- Sandang & pangan
- Transportasi
- Sewa
- Pendidikan
- Pajak
- Kesehatan
- Rekreasi
- Sumbangan
- Utilitas (listrik, telpon, air, dll)

Asal usul harta



Bagaimana memperoleh salinan naskah laporan harta?

<http://acch.kpk.go.id>

Indonesia | English

acch
akses dan transparansi keuangan publik

BERANDA EDUKASI PENINDAKAN STATISTIK PUBLIKASI TENTANG ACCH

WOMEN FIGHT CORRUPTION

Women Fight Corruption Conference

The objective of the conference was to increase awareness as well as to strengthen stakeholder commitment on the issues of women's movements fight against corruption.

Syamsul Arifin

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara yaitu sebagai Bupati Langkat periode 2000-2007, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. MA menjatuhkan vonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (TBN LHKPN)

Search:

Validation: 250 (Case Insensitive)

Pencarian...

ACCH PORTAL Goes to CAMPUS Festival 2013

26 MARET
24 APRIL

DI KAMPUS
UNIVERSITAS PARAMADINA

Putusan Pengadilan: Maret 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Perkara TPK atas nama terdakwa TB AAT SYAFAAT sehubungan dengan pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA 2010.

Majalah Integrito

Integrito: Januari-Februari 2013

Manual Website ACCH

- Buka halaman website dengan alamat <http://acch.kpk.go.id>
- Sign up (bagi yang belum memiliki account di website ACCH), setelah sign up akan mendapatkan password dari KPK yang digunakan untuk Log in;
- Log in di website acch;
- Ketik nama atau Nomor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (NHK) PN yang anda inginkan;
- Ketik ulang kode validasi;
- Klik Go;
- Klik View, kemudian di print atau di save ke dalam komputer.

Bagaimana melaporkan?

- 1. Uraikan kejadian & fakta yang dijumpai**
- 2. Sertakan bukti awal** (bila ada)
- 3. Sertakan identitas diri** (jika berkenan)
- 4. Kirim ke KPK :**
 - **SURAT** : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
 - **Email** : pengaduan@kpk.go.id
 - **KWS** : <http://kws.kpk.go.id>
 - **Telepon** : (021) 2557 8389
 - **Fax** : (021) 5289 2454
 - **SMS** : 0855 8 575 575 / 0811 959 575

Terima Kasih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

www.kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id



facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi



twitter.com/KPK_RI

**Pengaduan Dugaan Tindak
Pidana Korupsi:**

Direktorat Pengaduan
Masyarakat

PO BOX 575 Jakarta 10120

Telp: (021) 2557 8389

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959
575

Email: pengaduan@kpk.go.id

Informasi Gratifikasi:

Direktorat Gratifikasi

Telp: (021) 2557 8440

Email:

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Pelayanan Informasi Publik

Hubungan Masyarakat:

Telp: (021) 2557 8498

Faks: (021) 5290 5592

Email: informasi@kpk.go.id

**Informasi Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN):**

Direktorat LHKPN

Telp: (021) 2557 8396

Email : informasi.lhkpn@kpk.go.id

